

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori dan studi pustaka. Teori yang akan dibahas berkaitan dengan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, Kurva Phillips dan studi terkait.

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Definisi Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi (Bank Indonesia, 2016).

Definisi lain dari inflasi adalah kenaikan rata-rata semua tingkat harga semua barang dan jasa dimana kenaikan harga-harga tersebut berlangsung dalam waktu yang berkepanjangan dan secara terus-menerus. Menurut Milton Friedman, inflasi merupakan sebuah fenomena moneter yang selalu terjadi dimanapun dan tidak dapat dihindari. Inflasi dikatakan sebagai fenomena moneter hanya jika terjadi peningkatan harga yang berlangsung secara cepat dan terus-menerus. pendapat ini disetujui oleh banyak ekonom dari aliran moneteris (Mishkin, 2004).

Kenaikan harga secara terus-menerus yang menyebabkan inflasi dapat disebabkan oleh naiknya nilai tukar mata uang luar negeri secara signifikan terhadap mata uang dalam negeri. Inflasi menurut teori Keynes terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menyoroti bagaimana perebutan sumber ekonomi antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan *agregat* yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia. Dalam teori strukturalis inflasi berasal dari kekakuan struktur ekonomi khususnya *supply* bahan bakar minyak, dan bahan makanan yang mengakibatkan kenaikan harga pada barang lain.

Lebih lanjut Samuelson (1989), menambahkan ada pendekatan lain yang dapat menjadi pendekatan lain dalam mengukur tingkat inflasi selain Indeks Harga Konsumen dan Indeks Harga Produsen yakni GNP Deflator. GNP Deflator merupakan rasio GNP nominal dan GNP riil. GNP yang merupakan pendapatan nasional ini tersusun dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor suatu negara.

Seringkali timbul kesalahpahaman mengenai konsep inflasi di tengah masyarakat. Kesalahpahaman yang ada di masyarakat seperti anggapan tingkat inflasi membuat harga barang semakin mahal, dan inflasi yang tinggi sebagai pertanda bahwa masyarakat menjadi semakin miskin. Samuelson (1989) menjelaskan bahwa sesungguhnya inflasi berarti rata-rata tingkat harga mengalami peningkatan. Inflasi juga tidak selalu membuat masyarakat menjadi miskin apabila diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat

selama masa terjadinya inflasi. Sehingga pendapatan riil untuk kebutuhan hidup sehari-hari mungkin saja meningkat atau menurun selama masa inflasi.

Secara umum pendapat ahli ekonomi menyimpulkan bahwa inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli dari nilai uang terhadap barang-barang dan jasa, besar kecilnya ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Faktor lain yang juga turut menentukan fluktuasi tingkat harga umum diantaranya adalah kebijakan pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi kepada konsumen dan lain sebagainya.

Dari definisi yang ada tentang inflasi dapatlah ditarik tiga pokok yang terkandung di dalamnya (Gunawan, 1991), yaitu :

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
2. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus, bukan terjadi pada suatu waktu saja.
3. Mencakup tingkat harga umum (*general level of prices*) yang berarti tingkat harga yang meningkat itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja.

Menurut Samuelson (1989) tingkat inflasi dapat yang ditentukan dengan menghitung selisih tingkat harga tahun tertentu dengan tingkat harga

tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan tingkat harga tahun ini dan dikalikan dengan seratus persen.

Perhitungan inflasi dilakukan melalui dua pendekatan yakni Indeks Harga Konsumen dan Indeks Harga Produsen (IHP). Indeks Harga Konsumen yang dikenal sebagai IHK atau CPI yang mengukur biaya dari pasar konsumsi barang dan jasa. Biasanya inflasi didasarkan kepada harga bahan pangan, pakaian, perumahan, bahan bakar minyak, transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan dan komoditi lainnya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sedangkan Indeks Harga Produsen atau yang biasa dikenal sebagai PPI merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengukur tingkat inflasi berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen. Indeks ini berguna karena memberikan penjelasan yang lebih baik bagi dunia usaha (Samuelson, 1989).

Menurut Rahardja dan Manurung (2004) suatu perekonomian dikatakan telah mengalami inflasi jika tiga karakteristik berikut dipenuhi, yaitu : 1) terjadi kenaikan harga, 2) kenaikan harga bersifat umum, dan 3) berlangsung terus menerus. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu perekonomian sedang dilanda inflasi atau tidak. Indikator tersebut diantaranya :

1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Jika pada IHK yang diamati adalah barang-barang akhir yang dikonsumsi masyarakat, pada IHPB yang diamati adalah barang-barang mentah dan barang-barang setengah jadi yang merupakan input bagi produsen.

3. *GDP Deflator*

Prinsip dasar GDP deflator adalah membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil.

2.1.2. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam suatu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi, maka inflasi dibagi menjadi tiga kategori, yakni: merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*) serta inflasi tinggi (*hyper inflation*).

Inflasi merayap (*creeping inflation*) ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10 persen per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi merayap (*creeping inflation*).

Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga mengalami kenaikan 5 hingga 6 kali lipat. Masyarakat sudah tidak berkeinginan untuk menyimpan uang mereka. Nilai uang merosot tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang ditutup dengan mencetak uang.

2.1.3. Jenis Inflasi Menurut Sebabnya

Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil, perlu terlebih dahulu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi.

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar.

a. Cost-Push Inflation

Inflasi yang terjadi disertai turunnya tingkat produksi. Jadi inflasi jenis ini diikuti resesi dalam perekonomian. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi.

b. Demand-Pull Inflation

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi telah dalam keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir penuh. Jika kondisi kesempatan kerja penuh atau full employment sudah terjadi, kenaikan permintaan total hanya akan meningkatkan harga di pasar. Inflasi jenis ini disebut sebagai inflasi murni.

2.1.4. Inflasi Menurut Asalnya

- a. *Domestic Inflation*, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Penyebab dari inflasi jenis ini misalnya dari defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan mengeluarkan kebijakan moneter menambah jumlah uang yang beredar berupa pencetakan uang baru, gagal panen dari bahan makanan pokok, dan sebagainya.
- b. *Imported Inflation*, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbuka kecil, sehingga sangat dipengaruhi oleh perekonomian global termasuk tingkat inflasi. Imported inflation juga dapat disebabkan karena peningkatan dari harga di luar negeri yang dialami oleh mitra dagang Indonesia.

Kenaikan harga barang-barang impor yang masuk ke Indonesia akan mengakibatkan (1) kenaikan indeks harga konsumen karena sebagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat berasal barang-barang impor tersebut, (2) secara tidak langsung menaikkan indeks harga produsen karena beberapa input produksi berasal dari barang-barang import, (3) secara tidak langsung menimbulkan

kenaikan harga di dalam negeri karena kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan penurunan penerimaan pemerintah dari tarif impor yang dibebankan pada produk impor yang permintaannya mengalami penurunan.

2.1.5. Dampak Inflasi

Selama periode inflasi terjadi, tingkat harga dan upah tidak bergerak dalam tingkatan yang sama, maka inflasi akan memberikan dampak redistribusi pendapatan dan kekayaan diantara golongan ekonomi dalam masyarakat. Serta menimbulkan terjadinya distorsi dalam harga relatif, output, dan kesempatan kerja, dan ekonomi secara keseluruhan (Samuelson,1989).

Dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat terbagi menjadi dua yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari inflasi menyebabkan peredaran dan perputaran barang lebih cepat di masyarakat sehingga produksi barang-barang bertambah, dan keuntungan pengusaha bertambah. Kesempatan kerja bertambah, karena terjadi tambahan investasi yang tercipta berarti membuka banyak lapangan kerja baru sehingga masalah pengangguran dapat berkurang. Ketika inflasinya terkendali dan diikuti dengan pendapatan nominal yang bertambah, maka pendapatan riil masyarakat meningkat.

Inflasi pun memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian seperti kenaikan harga kebutuhan hidup, nilai dan kepercayaan terhadap uang akan berkurang. Menimbulkan tindakan spekulasi terhadap investasi

portofolio terutama portofolio asing yang paling diminati sehingga berdampak terhadap melemahnya nilai tukar mata uang domestik. Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar karena tidak sanggup membayar input dalam proyek yang harganya mengalami peningkatan. Dengan terjadinya inflasi menjadikan minat menabung masyarakat berkurang sebagai akibat dari turunnya nilai mata uang jika hal ini terjadi secara terus-menerus maka akan mematikan industri perbankan nasional.

2.2. Pengangguran

2.2.1. Definisi Pengangguran

Penduduk usia kerja adalah penduduk berusia diatas 15 tahun. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tenaga kerja atau man power terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan (Belante, 1990)

Selain itu, pengangguran tidak hanya disebabkan karena kurangnya lowongan pekerjaan, namundapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja tidak dapat dipenuhi oleh pencari kerja.

2.2.2. Jenis Pengangguran

Menurut Lipsey, *et al.* (1997), pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pengangguran siklis, pengangguran friksional, dan pengangguran struktural.

Pengangguran siklis adalah penganggur yang terjadi karena permintaan yang tidak memadai untuk membeli semua potensi output ekonomi, sehingga mengakibatkan senjang resesi di mana output aktual lebih kecil dari keluaran potensial. Kelompok penganggur ini juga dikatakan sebagai orang yang menganggur dengan terpaksa, dengan kata lain mereka ingin bekerja dengan tingkat upah yang berlaku tetapi pekerjaan yang mereka inginkan tidak tersedia.

Pengangguran struktural mengacu pada pengangguran yang disebabkan akibat ketidaksesuaian antar struktur angkatan kerja berdasarkan jenis keterampilan, pekerjaan, industri atau lokasi geografis dan struktur permintaan tenaga kerja.

Mankiw (2000) menyatakan bahwa pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penjataan pekerjaan. Para pekerja yang tidak dipekerjakan bukan karena mereka aktif untuk mencari pekerjaan yang cocok untuk mereka, namun pada tingkat upah yang berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya.

Sedangkan pengangguran friksional diakibatkan oleh perputaran normal tenaga kerja. Sumber penting pengangguran friksional adalah orang-

orang muda yang memasuki angkatan kerja dan mencari pekerjaan (Lipsey, *et al.*, 1997).

Mankiw (2000) menyatakan bahwa pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkan waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi.

2.2.3. Akibat Buruk Pengangguran

Kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa pengangguran struktural dan pengangguran normal bukanlah merupakan masalah pengangguran yang perlu dirisaukan. Mereka menganggap pengangguran tersebut timbul sebagai akibat dari berlakunya pertumbuhan ekonomi yang teguh yang mampu meminimumkan tingkat pengangguran dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomu yang cepat mengakibatkan pula perombakan dalam struktur kegiatan ekonomi dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Dengan demikian pengangguran normal dan pengangguran struktural merupakan pengangguran yang tidak dapat dielakkan.

Penganggutan yang lebih serius masalahnya dan yang menimbulkan berbagai akibat buruk kepada perekonomian dan masyarakat adalah pengangguran kongjungtur. Pertumbuhan ekonomi yang lambat (resesi) akan menambah jumlah dan persentase pengangguran. Keadaan kekurangan kesempatan kerja dan

kelesuan kegiatan produksi dan perdagangan akan terlihat lebih jelas. Pengangguran kongjungtur yang serius akan menimbulkan beberapa akibat buruk ke atas kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4. Pengukuran Tingkat Pengangguran

Perhitungan secara statistic baku mengenai jumlah pekerja maupun tingkay pengangguran banyak sekali digunakan dalam memperkirakan baik tidaknya suatu perekonomian secara makro sangat penting untuk mengetahui jumlah total dari pekerja dan pengangguran di hitung, yaitu untuk mengawasi jumlah keduanya sebagai bahan untuk membuat suatu kebijakan public.

Dalam konsep ketenagakerjaan yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja secara otomatis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja dapat pula di definisikan sebagai pekerja ditambah pengangguran.

$$\text{Tingkat Pengangguran (\%)} = \frac{\text{Penganggur}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100$$

Keterangan : Penganggur terbuka adlaah angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

2.3. Kurva Phillips

2.3.1. Dasar Teori Kurva Phillips

Tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Jadi diharapkan jika kebijakan ekonomi makro dapat mencapai sasarannya, yaitu menciptakan stabilitas harga dan dalam waktu bersamaan menciptakan kesempatan kerja.

Pada pasar tenaga kerja, penurunan tingkat upah akan mengakibatkan peningkatan pengangguran, hal ini disebabkan karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Selain itu, tingkat upah juga akan mengalami peningkatan jika terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja atau dengan kata lain jumlah pengangguran mengalami peningkatan dan jumlah pencarian kerja terus bertambah dan mengakibatkan penurunan tingkat upah.

Kurva Phillips menggambarkan ciri perhubungan diantara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, atau di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Nama kurva tersebut diambil dari orang yang mula-mula sekali membuat studi dalam aspek tersebut. Dalam tahun 1958 A.W. Phillips, yang pada waktu itu menjadi Profesor di *London School of Economics*, menerbitkan satu studi mengenai ciri-ciri perubahan tingkat upah di Inggris. Studi tersebut meneliti sifat hubungan diantara tingkat pengangguran dan kenaikan tingkat upah. Kesimpulan dari studi tersebut adalah : terdapat suatu sifat

hubungan yang negatif (berbalikan) diantara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Pada ketika tingkat pengangguran tinggi, persentasi kenaikan tingkat upah adalah rendah dan apabila tingkat pengangguran rendah, persentasi kenaikan tingkat upah adalah tinggi.

Pasar tenaga kerja didasarkan atas dua asumsi sebagai berikut :

1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja akan menentukan tingkat upah.
2. Perubahan tingkat upah ditentukan oleh besarnya kelebihan permintaan tenaga kerja yang disebut *Excess Demand*.

2.3.2. Kurva Phillips Jangka Panjang

Pada awal analisis kurva Phillips dijelaskan bahwa terdapat *trade off* antara inflasi dan pengangguran, yaitu kenaikan tingkat inflasi akan diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Namun kenyataannya di AS selama periode tertentu menunjukkan bahwa kenaikan tingkat inflasi diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran. Artinya tidak terdapat *trade off*. Pergeseran Kurva Phillips dapat dijelaskan melali beberapa tahapan berikut: Pada periode awal, pengangguran berada pada tingkat normal, tidak terdapat permintaan atau penawaran yang mencolok, selanjutnya pada periode kedua peningkatan yang cepat pada output selama ekspansi ekonomi menurunkan tingkat pengangguran. Seiring menurunnya pengangguran, perusahaan cenderung merekrut pekerja lebih banyak lagi, memberikan peningkatan upah yang lebih besar dari biasanya. Saat output melebihi potensinya, utilitas kapasitas meningkat

dan penggelembungan dana meningkat, upah dan harga mulai naik. Pada periode ketiga, dengan naiknya inflasi maka perusahaan dan pekerja akan mengharapkan inflasi yang lebih tinggi. Harapan inflasi yang lebih tinggi tampak dalam keputusan upah dan harga. Tingkat ekspektasi inflasi lalu meningkat. Tingkat ekspektasi inflasi meningkat diatas kurva phillip awal yang menunjukkan tingkat ekspektasi inflasi yang lebih tinggi.

2.3.3. NAIRU dan Dinamika Inflasi

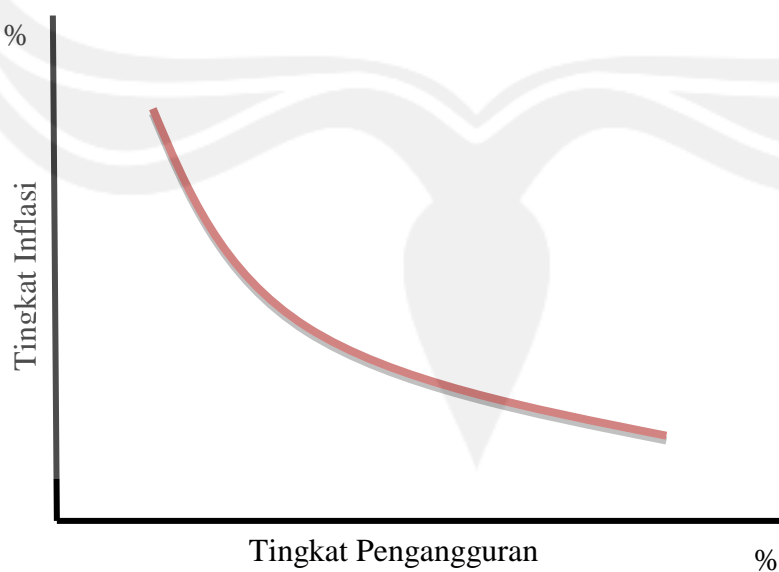
Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Dalam jangka pendek, penurunan satu tingkat berarti menaikkan yang lainnya. Tetapi kurva Phillips jangka pendek cenderung bergeser terus selama inflasi yang diharapkan dan faktor lainnya berubah. Apabila pembuat kebijakan bermaksud menjaga pengangguran di bawah NAIRU – *the nonaccelerating inflation rate of unemployment* –, inflasi akan cenderung naik.

Teori inflasi modern berpijak pada konsep NAIRU, yaitu tingkat pengangguran terendah yang dapat dinikmati tanpa resiko kenaikan inflasi. Hal ini mewakili tingkat pengangguran dari sumber daya dimana pekerja dan produk pasar berada dalam keseimbangan inflasi. Berdasarkan teori NAIRU, tidak ada pertukaran permanen antara pengangguran dan inflasi, dan kurva Phillips jangka panjang adalah vertikal.

2.3.4. Keterkaitan Pengangguran dan Kesempatan Kerja

Setiap Negara mengharapkan untuk mencapai tahap kegiatan ekonomi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Namun didalam prakteknya hal ini sangat sulit dilakukan. Ahli ekonomi telah menyadari bahwa, jika tingkat pengangguran rendah masalah inflasi akan semakin tinggi. Sedangkan jika terdapat masalah pengangguran yang serius, tingkat harga-harga adalah relatif stabil. Artinya tidak mudah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan kestabilan harga secara serentak.

Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka pengangguran berkurang.



Sumber: Samuelson and Nordhaus, 2004

Gambar 2.1
Kurva Phillips (*Phillips Curve*)

Bentuk kurva Phillips memiliki kemiringan yang menurun, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran, yaitu saat tingkat upah naik, pengangguran rendah atau sebaliknya. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah, sebagai kosekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Dengan kata lain, kurva ini menunjukkan adanya *trade-off* (hubungan negatif) antara inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu tingkat Pengangguran akan selalu dapat diturunkan dengan mendorong kenaikan laju inflasi dan bahwa laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran.

Terjadinya *trade-off* antara inflasi dan pengangguran membuat para pengambil kebijakan dihadapkan pada dua pilihan, apakah harus menerima inflasi yang tinggi dengan tingkat pengangguran yang rendah atau sebaliknya. Hal ini akan berpengaruh terhadap GDP yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan hal ini hukum Okun (*Okun law*) menyatakan bahwa setiap pengurangan pengangguran satu persen, maka GDP riil akan naik 2,5 persen. Dengan demikian pengambil kebijakan harus melihat kerugian-kerugian dari pengangguran dan masalah yang timbul bila laju inflasi tinggi. Pembuat kebijakan harus memutuskan berapa banyak pengangguran yang bisa diterima dan berapa

besar laju inflasi yang bisa ditolerir untuk mencapai keseimbangan intern (Samuelson, 2001:365).

2.4. Kaitan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran

Ketika inflasi mengalami peningkatan maka akan menyebabkan turunnya tingkat investasi. Hal ini dikarenakan kenaikan inflasi akan mendorong naiknya tingkat suku bunga, kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan mengakibatkan investasi mengalami penurunan. Turunnya investasi berarti akan menurunkan kapasitas produksi. Ketika kapasitas produksi menurun hal ini akan berdampak pada menurunnya penyerapan tenaga kerja di satu pihak, karena pengangguran di satu pihak meningkat maka pendapatan masyarakat menjadi berkurang, menurunnya tingkat pendapatan masyarakat selanjutnya berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat. Dimana menurunnya konsumsi masyarakat berarti juga menurunnya permintaan *agregat* (permintaan konsumsi), hal tersebut kemudian menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan selanjutnya akan menyebabkan dana anggaran belanja juga akan ikut turun.

Ketika pendanaan untuk anggaran belanja mengalami penurunan namun di lain sisi pemerintah ingin mempertahankan anggaran belanja yang tinggi guna memacu pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah akan berusaha mencari pendanaan baru dengan cara mencetak uang sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak yang berdampak pada tingginya inflasi karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Siklus ini akan terjadi secara terus menerus dan akan saling berkelanjutan.

2.5. Teori Kuantitas Uang

Teori ini menyoroti proses terjadi inflasi dari dua aspek, yakni jumlah uang beredar dan harapan (*expectations*) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti dari teori adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi hanya terjadi jika ada penambahan volume jumlah uang beredar. Tanpa adanya kenaikan jumlah uang beredar, kejadian seperti gagal panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara saja (bersifat temporer). Sebaliknya, bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun penyebab awal dari terjadinya kenaikan harga tersebut.
- b. Laju inflasi ditentukan oleh laju penambahan jumlah uang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Dalam hal ini, terdapat tiga (3) keadaan yang mungkin terjadi: Pertama, keadaan dimana masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Pada kondisi ini, kenaikan jumlah uang beredar tidak (atau hanya sedikit) menyebabkan kenaikan yang berarti pada permintaan *agregat*, dengan kata lain, tidak menimbulkan inflasi yang berarti. Sebagai contoh, kenaikan jumlah uang beredar sebesar 10% hanya diikuti dengan kenaikan harga-harga sebesar 1%. Keadaan ini biasanya dijumpai pada awal terjadinya inflasi dan masyarakat belum menyadari bahwa inflasi sedang berlangsung. Kedua, keadaan dimana masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa inflasi tengah terjadi. Pada kondisi ini,

masyarakat mulai memperkirakan bahwa harga-harga naik, dan penambahan jumlah uang beredar akan digunakan masyarakat untuk membeli barang-barang. Hal ini dilakukan karena masyarakat berusaha untuk menghindari kerugian yang timbul seandainya mereka memegang uang tunai. Dari segi masyarakat secara keseluruhan, hal ini berarti adanya kenaikan permintaan masyarakat akan barang-barang, sebagai akibatnya harga-harga barang akan naik. Bila masyarakat memperkirakan bahwa harga-harga akan naik di masa mendatang sebesar laju inflasi di bulan-bulan yang lalu, maka kenaikan jumlah uang beredar, katakanlah sebesar 1%, mungkin akan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang sebesar 1% pula. Ketiga, keadaan yang terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yakni hiperinflasi. Pada kondisi ini, masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang domestik. Masyarakat cenderung memperkirakan bahwa keadaan akan semakin memburuk, yang mana laju inflasi pada bulan-bulan mendatang diperkirakan oleh masyarakat akan lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya. Keadaan ini ditandai dengan semakin cepatnya jumlah uang yang beredar. Dalam keadaan ini, kenaikan jumlah uang beredar, sebesar 10% akan mengakibatkan kenaikan harga-harga >10%.

2.6. Studi Terkait/ Penelitian Terdahulu

Amir (2003) menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia pada periode 1980-2005 dengan menggunakan analisis grafis dan metode ANOVA. Variabel dependennya

adalah tingkat pengangguran dan variabel independennya adalah inflasi. Hasilnya adalah terdapat hubungan negatif namun tidak signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran baik secara statistik maupun grafis. Hal ini diduga karena inflasi di Indonesia lebih cenderung disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi, seperti misalnya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan karena kenaikan permintaan.

Saputra (2013) penelitian ini menggunakan metode seleksi model ARCH/GARCH dengan membandingkan antara model yang satu dengan yang lain. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti: nilai R^2 , nilai *Adjusted R²*, nilai AIC dan SIC, signifikansi dan deteksi penyimpanan asumsi klasik. Hasil regresi EGARCH-M 2.2 (dengan memasukkan *log variance* ke dalam persamaan rata-rata) dan memasukkan harga beras ke dalam *variance regressor*, menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar, kurs dan harga beras secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Sedangkan suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi inflasi di Indonesia.

Bhanthumnavin (2002) menganalisis kurva Phillips untuk negara Thailand dengan metode OLS menggunakan dua definisi inflasi (kuartalan dan tahunan). Estimasinya menyatakan bahwa teori Kurva Phillips di Thailand baru berlaku setelah Krisis Asia tahun 1997. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sebelum terjadinya krisis ekonomi 1997 tidak terdapat hubungan antara inflasi dan pengangguran seperti yang diungkapkan dalam Kurva Phillips. Hubungan ini negatif antara inflasi dan pengangguran ini baru terjadi setelah terjadinya krisis

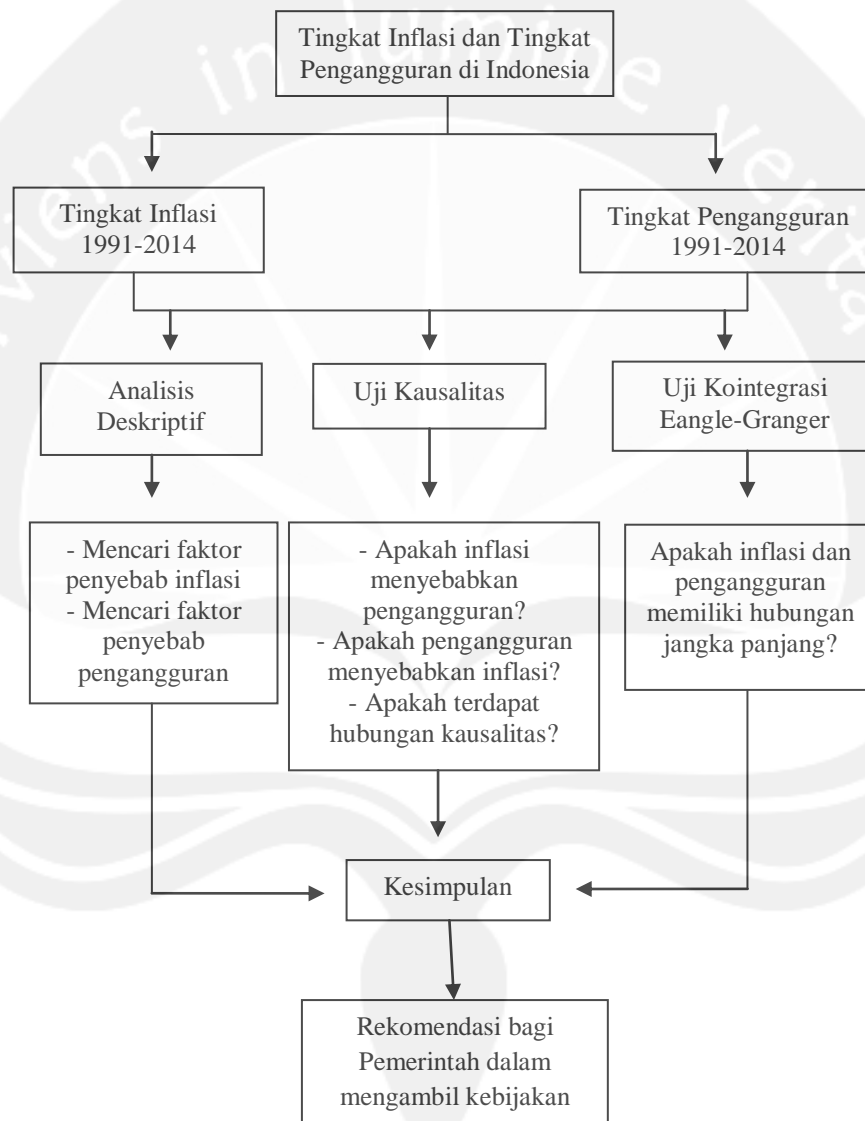
ekonomi 1997 yang telah memberikan guncangan struktural yang kuat terhadap kapasitas perekonomian dan sektor finansial.

Maichal (2012) menganalisis eksistensi fenomena kurva Phillips di perekonomian Indonesia 2000:Q1 – 2010:Q3. Hasil penaksiran yang diperoleh dengan menggunakan metode OLS menunjukkan bahwa model *expectations augmented Phillips curve* dan *new Keynesian Phillips curve* tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai eksistensi kurva Phillips di perekonomian Indonesia. Variable guncangan seperti persentase perubahan kurs dan harga minyak mentah memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Selanjutnya, hasil penaksiran dengan menggunakan metode GMM pada *hybrid model* dari *new Keynesian Phillips curve* menunjukkan bahwa fenomena kurva Phillips eksis di perekonomian Indonesia.

Solikin (2004) menyimpulkan bahwa fenomena Kurva Phillips eksis dalam perekonomian Indonesia, dimana keberadaan dan perilaku kurva tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan struktur fundamental perekonomian (*regime dependent*). Secara khusus, pola pembentukan ekspektasi dan linieritas dalam Kurva Phillips mengalami perbedaan (perubahan) yang signifikan antara periode pre dan pasca krisis

2.7. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka (alur) pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Alur Berpikir

Alur pemikiran di atas menunjukkan bahwa untuk menguji kausalitas antara inflasi dengan pengangguran dengan periode 1991-2014 dibutuhkan dua

variabel, yang pertama adalah inflasi dan yang kedua adalah pengangguran. Setelah itu dapat dilakukan uji kausalitas Granger untuk mengetahui apakah inflasi menyebabkan pengangguran, atau pengangguran menyebabkan inflasi, atau inflasi dengan pengangguran memiliki hubungan sebab akibat.

Setelah melakukan uji kausalitas Granger langkah selanjutnya yaitu melakukan uji kointegrasi Eangle-Granger yang bertujuan untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara inflasi dengan pengangguran. Dari hasil uji kausalitas Granger dan uji kointegrasi EangleGranger tersebut diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan ekonomi terkait dengan kausalitas dan hubungan jangka panjang yang terjadi.